

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam reformasi di bidang keuangan negara, perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan ini sangat penting karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia diberbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Karena begitu eratnya keterkaitan antara keuangan pemerintahan dan akuntansi pemerintahan, maka sistem dan proses yang lama dalam akuntansi pemerintahan banyak menimbulkan berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan (simanjuntak, 2012)

Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat (SAP) yang bertujuan memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah,(SAP) yang merupakan acuan dasar dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD dalam satu tahun anggaran.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai amanat Undang-undang Keuangan Negara tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti.

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur dan mengharuskan penerapan akuntansi berbasis akrual dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah, maka saat ini dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai pengganti PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Pada PP Nomor 71 Tahun 2010 diamanatkan bahwa penggunaan basis akrual (*full accrual*) dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah, dan dilaksanakan paling lambat pada tahun 2015. Dan untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2010 telah dikeluarkan

peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP) dan juga untuk membatu pelaksanaan teknis dalam melaksanakan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan dikeluarkannya Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Meskipun demikian dengan diterbitkannya serangkaian peraturan yang mendukung penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada sektor pemerintahan bukan menjadi suatu jaminan penerapan akuntansi berbasis akrual akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, ada banyak faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual. Pada PP No.71 Tahun 2010 batas waktu penerapan sistem akuntansi akrual secara penuh (*full accrual*) diundur sampai dengan tahun 2014 diharapkan pada waktu yang ditentukan seluruh pemerintah daerah dapat menerapkan standar akuntansi berbasis akrual secara serentak dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD/APBN.

Namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan penerapan akuntansi berbasis akrual khususnya pada wilayah pemerintah Sumatera Selatan masih belum bisa direalisasikan secara penuh sehingga target dalam penerapan SAP berbasis akrual harus diundur lagi, dan sampai dengan tahun 2015 pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual secara penuh (*full accrual*) dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Namun dilihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah untuk periode tahun 2015 masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah yang belum mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), dan salah satu penyebabnya adalah penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (SAP). Hal ini merupakan suatu indikator bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual (SAP) pada pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang ada di wilayah Sumatera Selatan masih belum bisa dilaksanakan secara optimal.

Keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan karena banyak faktor mempengaruhi penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah adapun faktor-faktor tersebut adalah Kualitas Sumber daya manusia, Resistensi Terhadap Perubahan, Kualitas Teknologi Informasi, dan Dukungan Konsultan. Penelitian yang meneliti tentang faktor-faktor tersebut telah banyak dilakukan, Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak seragam. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi objek penelitian yang berbeda, berikut ini penelitian yang telah meneliti bagaimana faktor-faktor Kualitas Sumber daya manusia, Resistensi Terhadap Perubahan, Kualitas Teknologi Informasi, dan Dukungan Konsultan tersebut mempengaruhi penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah.

Faktor pertama adalah Sumber Daya Manusia yang lenajutnya disingkat SDM. Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu organisasi dimana sumber daya manusia merupakan satu dari sekian banyak faktor yang menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, mengingat hal tersebut SDM tentu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam penerapan SAP berbasis akrual pada penelitian yang telah dilakukan Hasibuan (2015) dan hasil dari penelitiannya bahwa SDM berpengaruh positif terhadap penerapan SAP Berbasis Akrual, pada penelitian lain yang telah dilakukan Adventana (2014) dan hasil dari penelitian ini bahwa SDM berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerapan SAP berbais akrual.

Faktor kedua yang mempengaruhi penerapan SAP berbasis Akrual yaitu Resistensi Terhadap Perubahan yang merupakan kecenderungan bagi pekerja untuk tidak ingin berjalan seiring dengan perubahan organisasi, baik oleh ketakutan individual atas sesuatu yang tidak diketahui atau kesulitan organisasional, dengan kata lain hal ini dapat diartikan suatu pandangan organisasi terhadap suatu perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Pada peneltian yang telah dilakukan Hasibuan (2015) dan hasil dari penelitiannya bahwa resistensi terhadap perubahan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penerapan SAP berbasis akrual.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penerapan SAP berbasis AkruaI yaitu Teknologi Informasi yang ada pada organisasi, Teknologi Informasi merupakan perangkat pendukung yang memberikan sarana bagi organisasi dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi. Pada penelitian yang telah dilakukan Adventna (2014) hasil dari penelitiannya mengatakan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP Berbasis AkruaI namun berbeda dengan Penelitian yang telah dilakukan Ranilha J (2016) yang mendapatkan hasil bahwa Teknologi Informasi memiliki pengaruh Positif terhadap penerapan SAP berbasis akruaI, dan pada penelitian lain yang telah dilakukan oleh Kusuma (2013) hasil dari penelitiannya adalah teknologi informasi berpengaruh Negatif terhadap penerapan SAP berbasis akruaI, dan pada penelitian yang telah dilakukan Farida (2014) mengatakan bahwa Teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAP berbasis akruaI.

Faktor keempat yang mempengaruhi penerapan SAP berbasis AkruaI adalah Dukungan Konsultan yaitu adanya dukungan dari konsultan profesional yang digunakan oleh satuan kerja untuk membantu didalam memahami, menerapkan, dan menggunakan SAP berbasis akruaI. Pada penelitian yang telah dilakukan Hasibuan (2015) hasil dari penelitiannya adalah dukungan konsultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerapan SAP berbasis akruaI sementara Penelitian yang telah dilakukan Ranilha J (2016) hasil penelitiannya adalah pelatihan staf keuangan tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis AkruaI, sementara pada penelitian yang telah dilakukan oleh Farida (2014) bahwa dukungan konsultan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAP berbasis akruaI.

Melihat dari penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak seragam sehingga penelitian tentang analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAP berbasis akruaI perlu diteliti kembali. Perbedaan hasil-hasil penelitian sebelumnya juga memberikan acuan yang cukup bagi penulis untuk melakukan penelitian kembali tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan SAP berbasis akruaI pada Pemerintah Kota Palembang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu *Pertama*, terdapat pada objek penelitian, pada penelitian ini peneliti akan meneliti pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan respondennya adalah Pegawai/staf Keuangan, perbedaan *Kedua*, terletak tahun penelitian yang mana penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2017 dan perbedaan yang *Ketiga*, terletak pada variabel penelitian pada masing-masing peneliti terdahulu menggunakan variabel independen beragam yaitu Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Resistensi Terhadap Perubahan, Komunikasi, Kualitas Teknologi Informasi, dan Dukungan Konsultan dengan variabel Dependen Penerapan SAP Berbasis Akual. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu, Kualitas SDM, Resistensi Terhadap Perubahan, Kualitas Teknologi Informasi, dan Dukungan Konsultan dengan variabel dependennya adalah Penerapan SAP Berbasis Akual. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu serta didukung dengan beberapa fakta yang ada, penulis ingin meneliti kembali tentang **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan SAP Berbasis Akual pada Pemerintah Kota Palembang”**

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah Kualitas SDM berpengaruh terhadap penerapan SAP Berbasis Akual pada Pemerintah Kota Palembang?
2. Apakah Resistensi terhadap Perubahan berpengaruh terhadap penerapan SAP Berbasis Akual pada Pemerintah Kota Palembang?
3. Apakah Kualitas Teknologi Informasi berpengaruh terhadap penerapan SAP Berbasis Akual pada Pemerintah Kota Palembang?
4. Apakah Dukungan Konsultan berpengaruh terhadap penerapan SAP Berbasis Akual pada Pemerintah Kota Palembang?
5. Apakah SDM, Resistensi Terhadap Perubahan, Teknologi Informasi, Dukungan Konsultan berpengaruh terhadap penerapan SAP Berbasis Akual Pada Pemerintah Kota Palembang?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini membahas Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintahan sebagai Variabel Dependen dimana faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah Kualitas SDM, Resistensi Terhadap Perubahan, Kualitas Teknologi Informasi, dan Dukungan Konsultan, sebagai variabel Independen yang menjadi Objek penelitian ini adalah pemerintah kota Palembang dan peneliti mengambil sampel pada 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada pada pemerintah kota Palembang dengan responden sebanyak 3 orang responden dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode purposive sampling, yaitu staf/pegawai bagian pengelola keuangan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang yang memenuhi kriteria. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Responden adalah para pegawai/staf yang telah memiliki pengalaman kerja dalam mengelola bagian keuangan minimal selama 1 tahun.
2. Pegawai/staf yang bekerja di bagian keuangan dan terlibat langsung dalam penyusunan Laporan Keuangan.

sehingga jumlah seluruh responden dalam penelitian ini sebanyak 153 Responden. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2017.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Pengaruh Kualitas SDM dengan tingkat penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Palembang.
2. Mengetahui Pengaruh Resistensi Terhadap Perubahan dengan tingkat penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Palembang.
3. Mengetahui Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi dengan tingkat penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Palembang.

4. Mengetahui Pengaruh Dukungan Konsultan dengan tingkat penerapan SAP Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Kota Palembang.
5. Mengetahui Pengaruh Kualitas SDM, Resistensi Terhadap Perubahan, Kualitas Teknologi Informasi, Dukungan Konsultan secara bersamaan berpengaruh terhadap penerapan SAP Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Memberikan manfaat sebagai bahan Referensi untuk penelitian yang selanjutnya khususnya yang berhubungan tentang peran Kualitas SDM, Resistensi Terhadap Perubahan, Kualitas Teknologi Informasi, dan Dukungan Konsultan dan sejauh mana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap tingkat penerapan SAP Berbasis AkruaI.
2. Memberikan masukan penulis tentang pentingnya pemahaman mengenai pemanfaatan Kualitas SDM, Resistensi Terhadap Perubahan, Kualitas Teknologi Informasi, Dukungan Konsultan dan sejauh mana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap Penerapan SAP berbasis akruaI yang diaplikasikan pada dunia kerja.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Kualitas SDM, Resistensi Terhadap Perubahan, Kualitas Teknologi Informasi, Dukungan Konsultan yang diterapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah.
4. Memberikan manfaat bagi organisasi khususnya Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Palembang untuk mempertimbangkan dampak dari Kualitas SDM, Resistensi Terhadap Perubahan, Kualitas Teknologi Informasi, Dukungan Konsultan terhadap penerapan SAP berbasis akruaI dan mendorong setiap organisasi untuk memanfaatkan faktor-faktor tersebut untuk membantu meningkatkan penerapan SAP berbasis akruaI.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Guna membuat laporan ini lebih terarah, maka secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab dimana tiap-tiap bab memiliki keterkaitan

antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang mendasari penyusunan laporan skripsi dengan mengemukakan teori-teori dan literatur yang mendukung pembahasan dari permasalahan yang ada yaitu Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah, Basis Akuntansi< basis Akuntansi Akrua, Penerapan SAP Berbasis Akrua, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Pengertian Sumber Daya Manusia, Pengertian Resistensi Terhadap Perubahan, Pengertian Teknologi Informasi, Pengertian Dukungan Konsultan, kerangka pemikiran, peneliti terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil yang didapat setelah mengadakan penelitian yang mencakup hasil penelitian dengan melakukan pembahasandanevaluasiterhadap Kualitas SDM, Resistensi Terhadap Perubahan, Kualitas Teknologi Informasi, dan Dukungan Konsultan dan bagaimana Keempat Faktor Tersebut Berpengaruh Terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrua, dalam bab ini pula di jelaskan pengembangan Hipotesis yang di kembangkan sebelumnya pada bab ii

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan penulis dan dari kesimpulan dapat memberikan saran sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.